

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim.2008. Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN.
- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul, H., & Muhammad, S. K. (2012). Teori, Konsep dan Aplikasi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Jakarta: Salemba Empat.
- Ajeng Apridiyanti, 2019., “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017.”
- Anita Wulandari. (2001) “Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah.” Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah (Vol. 5 No. 2) November.
- Baldric Siregar. 2017. Akuntansi Sektor Publik.Edisi 2. Yogyakarta : UPP
- Carunia, Mulya Firdausy. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Daerah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gusti Made Ayu Aprilianda, 2016., Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro
- Julitawati, dkk. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Akuntansi ISSN2302-0164 Volume I, No.I, Agustus 2012. Universitas Syiah Kuala.
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mohammad Mahsun (2009). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : BPFE
- Nugroho, Fajar dan Abdul Rohman. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah

Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah).
Jurnal Akuntansi Diponegoro, Volume 1, No. 2.

Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Sujarweni, V. Wiratna. (2017). Analisis Laporan Keuangan : Teori, Aplikasi, & Hasil Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi UU Nomer No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 4 Nomor 106 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memerhatikan asas keadilan dan kepatutan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.